

Lampiran 1

Perbandingan Struktur, Klasifikasi dan Pos-pos Akun

Antara Kepmendagri 29/2002 dengan PP 24/2005

1.1 PERBANDINGAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN: STRUKTUR APBD DAN KLASIFIKASI APBD

Pembahasan	Kepmendagri 29/2002	PP 24/2005
Struktur APBD	Anggaran Pendapatan, Anggaran Belanja, dan Anggaran Pembiayaan.	Sama, namun ada penyajian Laporan Realisasi Anggaran pada lembar muka Anggaran Belanja.
Klasifikasi Pendapatan	Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan Yang Sah.	Pada prinsipnya sama, yaitu Pendapatan Asli Daerah, Transfer yang berasal dari Pemerintah Pusat dan Pemda lain, serta Lain-lain Pendapatan Yang Sah.
Klasifikasi Belanja Berdasarkan Jenis:		
1. Belanja Operasi	Dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu Belanja Administrasi Umum dan Belanja Operasi dan Pemeliharaan, masing-masing terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Perjalanan Dinas, dan Belanja Pemeliharaan.	Diringkas menjadi Belanja Pegawai, Belanja Barang (terdiri dari Belanja Barang dan Jasa, Belanja Pemeliharaan dan Belanja Perjalanan), dan Bunga.
2. Belanja Modal	Disajikan dalam satu akun gabungan.	Dirinci sesuai dengan klasifikasi aset tetap di neraca, yaitu Belanja modal tanah, Belanja modal gedung dan

		bangunan, Belanja modal jalan, irigasi dan jaringan, Belanja modal aset tetap lainnya, dan Belanja aset lainnya.
3. Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan	Belanja yang dibayarkan kepada pemerintah bawahan/desa/lembaga sosial/organisasi profesi.	Diklasifikasi ke dalam salah satu jenis belanja, yaitu Hibah, Subsidi, Bantuan Sosial, dan Transfer, tergantung substansi yang dimaksud.
4. Belanja Tak Terduga	Disebut juga Belanja Tak Tersangka, mencakup pengembalian pendapatan tahun lalu namun tidak dirinci jenis pengembaliannya.	Pengembalian pendapatan dirinci menjadi pengembalian <i>recurring</i> , <i>nonrecurring</i> pada periode penerimaan pendapatan, dan <i>nonrecurring</i> pada periode sebelumnya.
Klasifikasi Belanja Berdasarkan Organisasi	Berdasarkan pengguna anggaran (satuan kerja perangkat daerah).	Sama, disajikan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK).
Klasifikasi Belanja Berdasarkan Fungsi	N/A	Seharusnya dirinci lebih lanjut menjadi Sub Fungsi dan Sub-sub Fungsi. Di Pemerintah Pusat, rincian baru sampai Sub Fungsi sebagaimana diatur dalam PP 21/2004 Tentang Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga. Di Pemda, belum ada ketentuan lebih lanjut tentang rincian fungsi pemerintahan.
Klasifikasi Pembiayaan	Sama.	Sama.

1.2 PERBANDINGAN POS-POS NERACA

Pembahasan	Kepmendagri 29/2002	PP 24/2005
Struktur Neraca	Menggunakan istilah lancar dan nonlancar.	Pada dasarnya sama dengan sedikit perbedaan terjadi dalam penggunaan istilah dan klasifikasi ekuitas.
Pos Aset		
1. Aset Lancar	Kas, investasi jangka pendek, piutang dan persediaan. Biaya Dibayar Dimuka termasuk uang untuk dipertanggungjawabkan yang berada ditangan para pemegang kas atau Bendahara Pengeluaran.	Sama, namun Belanja Dibayar Dimuka merupakan uang yang dibayarkan kepada pihak ketiga, dimana hingga tanggal neraca belum diterima prestasi kerja, yang berupa barang/jasa dari pihak ketiga yang bersangkutan.
2. Investasi Jangka Panjang	Diklasifikasikan menjadi investasi dalam saham dan investasi dalam obligasi; penilaian berdasarkan harga perolehan.	Dibedakan menjadi investasi nonpermanen dan permanen; penilaian berdasarkan aturan yang berbeda untuk setiap investasi (metode biaya, ekuitas dan metode nilai bersih).
3. Aset Tetap	Perbedaan pada rincian aset tetap dengan klasifikasi lebih lengkap, Konstruksi Dalam Pengerjaan disajikan dalam kelompok Aset Lain-lain, diakui pada harga perolehan dan dilakukan depresiasi.	Klasifikasi lebih sederhana, Konstruksi Dalam Pengerjaan disajikan dalam kelompok Aset Tetap, diakui pada harga perolehan dan dilakukan depresiasi. Jika depresiasi belum bisa dilakukan, diungkapkan pada CaLK.

4. Dana Cadangan	Disajikan dalam Neraca sebesar akumulasi nilai dana cadangan.	Sama.
5. Aset Lainnya	Konstruksi Dalam Pengerjaan dan Aset Tak Berwujud Lainnya, diakui pada harga perolehan.	Aset Tak Berwujud Lainnya, diakui pada harga perolehan.
Pos Kewajiban	Kewajiban Jangka Pendek (lancar) dan Jangka Panjang (nonlancar).	Sama.
Pos Ekuitas	N/A	Pendekatan <i>self-balancing group of accounts</i> .

1.3 PERBANDINGAN POS-POS LAPORAN ARUS KAS

Pembahasan	Kepmendagri 29/2002	PP 24/2005
Struktur Laporan	Disebut Laporan Aliran Kas, klasifikasi arus kas dari aktivitas Operasi, Investasi Aset Nonkeuangan dan Pembiayaan.	Mengklasifikasikan arus kas masuk dan keluar dari aktivitas Operasi, Investasi Aset Nonkeuangan, Pembiayaan, dan Nonanggaran.
Arus Kas Masuk dari Aktivitas Operasi	Pendapatan Operasi berasal dari Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer dari pusat maupun daerah, Pendapatan Dana Darurat, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah.	Pada dasarnya sama, namun ada sumber pendapatan yang tidak termasuk pendapatan dari operasi, yaitu yang berasal dari penjualan aset tetap secara tunai maupun angsuran (diklasifikasikan arus kas masuk dari aktivitas investasi).
Arus Kas Keluar dari Aktivitas Operasi	Diklasifikasikan ke dalam Belanja Administrasi Umum, Belanja Operasi dan	Sama, namun mencakup belanja pegawai, belanja barang, subsidi, bunga, hibah, bantuan sosial, belanja

	Pemeliharaan, Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan, dan Belanja Tak Tersangka.	tak terduga dan belanja bagi hasil.
Arus Kas dari Aktivitas Investasi Nonkeuangan	Termasuk arus kas untuk perolehan atau penjualan aset tetap maupun penyertaan modal.	Arus kas dari perolehan atau penjualan aset tetap.
Arus Kas dari Aktivitas Pembiayaan	Penerimaan pajak tahun lalu dan pembayaran utang pajak/biaya tahun lalu tidak dibedakan.	Dibedakan berdasarkan <i>recurring</i> , <i>nonrecurring</i> pada periode diterima/dibayar, dan <i>nonrecurring</i> pada periode tahun lalu.
Arus Kas dari Aktivitas Nonanggaran	Belum diatur.	Penerimaan kas untuk Perhitungan Pihak Ketiga (PFK), juga menyajikan pengeluaran kas untuk penyetoran PFK kepada pihak yang berhak. Yang termasuk dalam PFK antara lain pungutan PPh, PPN, Taspen, Askes, Taperum, dan pungutan lainnya yang harus disetor kepada pihak ketiga yang berhak.
Saldo Kas	Menggunakan saldo kas awal dan akhir. Saldo kas akhir berupa kas di Kas Daerah.	Sama, namun saldo kas akhir selain berupa kas di Kas daerah, juga mencakup saldo kas di Bendahara Pengeluaran, dan saldo kas di Bendahara Penerimaan.